

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian, S. (2007). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bercovitch, J. (2019). *Social Conflict and Third Parties: Strategies of Conflict Resolution*. New York: Routledge.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnoor, N. A. (2019). *Politik Agraria dan Administrasi Pertanahan*. Sumedang: Unpad Press.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan dalam Organisasi*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhid, A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pido, S. A. (2017). *Manajemen Konflik: Teori dan Aplikasi*. Gorontalo: Pustaka Cendikia.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*. New Jersey:

Pearson Education, Inc.

Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, F., & Wasistiono, S. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan: Edisi Revisi yang Diperluas*. Sumedang: IPDN Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2016). *Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.

Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (2012). *Conducting Educational Research*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Madura: UTM Press.

Winardi. (2020). *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: Mandar Maju.

Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

## **Jurnal**

Brinkerhoff, D., Johnson, R., & Hill, R. (2009). Guide to Rebuilding Governance in Stability Operations: A Role for the Military? *Strategic Studies Institute, US Army War College*. <https://www.jstor.org/stable/resrep12059.5>.

Ginting, D. (2016). Resolution of Land Disputes in a Perspective of Indonesia's Land Law Reformation. *IJABER*, 871-883.

Kasiyani, D., & Ardhan, F. (2020). Manajemen Penanganan Konflik Agraria di

- Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 31-41.
- Kurniati, N. (2016). Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 207-217.
- Marzuki, I. W. (2015). Konflik dan Penyelesaiannya dalam Penelitian Arkeologi di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Manado. *AMERTA*, 77-134.
- Nischal, S. (2014). Application of Thomas Kilmann Conflict Resolution Mechanism for Conflict Management HR of Manufacturing Sector. *IISUniv J. Com Mgt*, 62-70.  
<http://iisjcm.iisuniv.ac.in/sites/default/files/IISJCM/2014/5.pdf>
- Nulhaqim, S., M., F., E., H., & Adiansah, W. (2022). Peran Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 42-49.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 126-141.
- Oberschall, A. (1978). Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology*, 291-315. <http://www.jstor.org/stable/2945973>.
- Zulfikar, A. (2015). Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan. *Jurnal Lex Specialis*, 21.  
[http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/50/45](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/50/45).

### **Skripsi**

- Alfit Andreal. 2014. KONFLIK PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN TOL SERPONG-CINERE STUDI TENTANG STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RENCANA PEMBANGUNAN TOL SERPONG-CINERE DI KOTA TANGERANG SELATAN, Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Faiz Firzatullah. 2019. MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA LAHAN DAGO ELOS KELURAHAN DAGO KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018, Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Georgius Benny. 2023. DELIBERASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERUMUSAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN, Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Talolo Muara. 2017. MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENYELESAIAN KASUS REKLAMASI PULAU G PANTAI UTARA JAKARTA TAHUN 2015-2016, Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

### **Dokumen Instansi Pemerintah**

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Kajian Pemerintah Kota Jakarta Selatan atas Permohonan PT Pertamina Training and Consulting kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 296/PTC-12010/2020-SO.4 tanggal 25 Juni 2020

Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2009

### **Dokumen Informan**

Materi Diskusi LMID Menilik Problematika Hukum di Pancoran Buntu II

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Daerah Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

## **Laman**

<https://jakarta.bps.go.id/statictable/2021/09/21/308/realisasi-bidang-tanah-yang-telah-terdaftar-menurut-kota-administrasi-di-provinsi-dki-jakarta-2018.html>

Diakses pada Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#\\_ftnref10](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#_ftnref10)

Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 Pukul 11.45 WIB.

<https://metro.tempo.co/read/1444420/bem-ui-ungkap-kronologi-sengketa-lahan-di-pancoran-ii-sejak-1973>

Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 Pukul 11.32 WIB.

<https://www.kompasiana.com/michaelagungn/58316c0b82afbd9e0ae1f3a2/sentimen-primordial-masihkah-relevan-hingga-kini>. Diakses pada Rabu, 2 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

<https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022. Pukul 12.17 WIB.

<http://psa.ipb.ac.id/faq-2/#:~:text=Agraria%20merupakan%20hal%20Dhal%20yang,karena%20terkait%20dengan%20pengolahan%20lahan>. Diakses pada Jumat, 30 Desember 2022. Pukul 15.00 WIB

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr). Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>. Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/05/20/perbedaan-hukum-formil-dan-materil-berdasarkan-sumber-hukumnya/#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Materil%20adalah%20menerangkan,perhatian%20ditujukan%20kepada%20isi%20peraturan>. Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, Pukul 23.00 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/09/jakarta-pusat-jadi-wilayah-terpadat-di-ibu-kota-per-juni-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,penduduk%20di%20Provinsi%20DKI%20Jakarta>. Diakses pada Senin, 13 Februari 2023 Pukul 20.34 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/15/20292341/sengketa-lahan-pancoran-buntu-ii-berlanjut-pemkot-optimistis-bisa-amankan?page=all>. Diakses pada Jumat, 24 Februari 2023 Pukul 20.02 WIB.

<https://bantuanhukum.or.id/warga-pancoran-buntu-ii-meminta-komnas-ham-untuk-segera-menindaklanjuti-aduan-atas-tindakan-penggusuran-paksa-di-pancoran-buntu-ii/>. Diakses pada Jumat, 24 Februari 2013 Pukul 20.10 WIB

[https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page\\_num=3](https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page_num=3). Diakses pada Jumat, 24 Februari 2023 Pukul 21.09 WIB.

